

Katalog: 4102004.1403
ISSN: 2721-7736

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2023

VOLUME 7, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KATALOG: 4102004.1403

ISSN: 2721-7736

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2023

VOLUME 7, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**STATISTIK DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2023**

Katalog: 4102004.72

ISSN: 2721-7736

Nomor Publikasi: 14030.2333

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 85 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Pembuat Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir”

Tim Penyusun
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Indragiri Hilir 2023
Volume 7, 2023

Pengarah & Penanggung Jawab Umum:
Sudiro, S.ST., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis:
Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Editor:
Mailiza, S.E.
Helen Fricylya Br Tobing, S.Tr.Stat.

Penulis dan Pengolahan Data:
Anas Rulloh Budi Alamsyah, S.Tr.Stat.
Friska Aprilia Barus, A.Md.T.
Sishilia Marestha, S.Tr.Stat.

Desain/Layout:
Anas Rulloh Budi Alamsyah, S.Tr.Stat.
Sishilia Marestha, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan tidak akan tercapai jika hanya sekadar menginginkannya. Ungkapan seorang bijak tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan harus diperjuangkan. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan sarana dan prasarana terus diupayakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir 2023 menggambarkan kondisi serta perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2023. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Pola Konsumsi, Perumahan, Kemiskinan, serta Kondisi Sosial Lainnya.

Semoga publikasi ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan serta berbagai kajian ilmiah. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya publikasi ini.

Tembilahan, Desember 2023

Sudiro, S.ST., M.Si.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X

I. KEPENDUDUKAN	1-12
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	3
Komposisi dan Kepadatan Penduduk	5
Angka Beban Ketergantungan	8
Perkawinan dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran	9
II. PENDIDIKAN	13-26
Perkembangan Pendidikan	15
Kemampuan Membaca dan Menulis	20
Fasilitas Pendidikan	23
III. KESEHATAN	27-36
Derajat Kesehatan	29
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	30
Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita	31
Pola Hidup Merokok	33
Fasilitas Kesehatan dan Pemanfaatannya	34
IV. KONDISI KETENAGAKERJAAN	37-44
Angkatan Kerja	39
Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	42
Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan	43

DAFTAR ISI



45-50	V. POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA
47	Pola Konsumsi Masyarakat
49	Konsumsi Energi dan Protein
51-58	VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
53	Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal
56	Fasilitas Rumah Tinggal
59-66	VII. KEMISKINAN
61	Perkembangan Penduduk Miskin
63	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
63	Karakteristik Penduduk Miskin
67-73	VIII. SOSIAL LAINNYA
69	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi
71	Tindak Kejahatan masih perlu Diwaspadai
72	Penerima Kredit Usaha
	DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2022-2023	1.1	5
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan, 2023	1.2	9
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	2.1	22
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2022/2023	2.2	23
Rasio Murid-Guru, Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023	2.3	25
Penduduk Berumur 0-23 tahun Menurut Apakah Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, 2022-2023	3.1	32
Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) menurut Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan, 2023	3.2	32
Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Apakah Merokok Tembakau dan Rata-rata Rokok per Minggu yang dihisap (Batang), 2023	3.3	33
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022	3.4	35

DAFTAR TABEL

36	3.5	Persentase Penduduk yang Rawat Jalan dan Rawat Inap di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2022
43	4.1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2020-2023
49	5.1	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2023
54	6.1	Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan, 2020-2022 (persen)
57	6.2	Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2020-2022 (persen)
64	7.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2021-2023
64	7.2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2021-2023
65	7.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja, 2020-2022
72	8.1	Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya, 2020-2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk,2020-2023	4
Gambar 1.2	Persentase Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, 2023	4
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, 2022	5
Gambar 1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023	6
Gambar 1.5	Perbandingan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau, 2020-2023	7
Gambar 1.6	Persentase Penduduk Usia Produktif dan Usia Tidak Produktif, 2023	8
Gambar 1.7	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 tahun ke atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir, 2018-2022	10
Gambar 1.8	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023	11
Gambar 1.9	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022	11
Gambar 2.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2023 (Tahun)	16
Gambar 2.2	Perbandingan Total APS Menurut Umur, 2021-2023	17
Gambar 2.3	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023	18

DAFTAR GAMBAR

- 
- 19 Gambar 2.4 Perbandingan Total APM Menurut Umur, 2021-2023
- 20 Gambar 2.5 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023
- 21 Gambar 2.6 Angka Melek Huruf Menurut Umur di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022
- 21 Gambar 2.7 Penduduk Berumur 15+ Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin, 2023
- 21 Gambar 2.8 Penduduk Berumur 15+ Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, 2023
- 22 Gambar 2.9 Penduduk Berumur 15+ Menurut Ijazah yang Ditamatkan, 2020-2023
- 30 Gambar 3.1 Kelurahan Kesehatan Sebulan yang Lalu dan Angka Kesakitan, 2022-2023 (persen)
- 31 Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) dan Laju Pertumbuhan UHH, 2014-2023
- 33 Gambar 3.3 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk Konsumsi Rokok, 2018-2022
- 34 Gambar 3.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan, 2021
- 35 Gambar 3.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2022

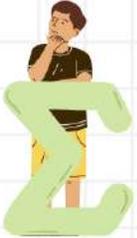
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, 2018-2023	40
Gambar 4.2	Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022-2023	40
Gambar 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2019-2023	41
Gambar 4.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2023	41
Gambar 4.5	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2023	42
Gambar 4.6	Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, 2023	43
Gambar 4.7	Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2023	44
Gambar 5.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023	48
Gambar 5.2	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022	48
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah (m ²), 2022	55
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Lantai Rumah Terluas, 2022	55
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Dinding Rumah Terluas, 2022	56

DAFTAR GAMBAR

- 
- 56 Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Atap Rumah Terluas, 2022
- 58 Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2022
- 58 Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2022
- 62 Gambar 7.1 Jumlah (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (persen), 2019-2023
- 62 Gambar 7.2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2019-2023
- 63 Gambar 7.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, 2019-2023
- 70 Gambar 8.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan/Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir, 2021-2022
- 70 Gambar 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2022-2023
- 71 Gambar 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2022-2023
- 72 Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir, 2020-2022
- 73 Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit, 2021-2022

BAB I KEPENDUDUKAN



677.290
Jiwa

**JUMLAH
PENDUDUK**



**KEPADATAN
PENDUDUK**

50,07

SEX RATIO

106,98

107

100



**ANGKA BEBAN
KETERGANTUNGAN**

43,99

I. Kependudukan

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah negara. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, baik dari sisi jumlah maupun karakteristik lainnya, seperti komposisi dan distribusinya. Data yang dapat dimanfaatkan tidak hanya kondisi saat ini, akan tetapi kondisi masa lampau dan proyeksi masa yang akan datang juga sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Data kependudukan sangat dibutuhkan hampir di semua rencana program pembangunan. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat mempertimbangkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya keping mata uang, jumlah penduduk memiliki dua sisi dalam proses pembangunan. Di satu sisi jumlah penduduk menjadi modal penting dalam proses pembangunan karena dalam pertumbuhan penduduk disertai pula adanya hal-hal lain yang menyertai. Namun di sisi lain, jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi pemerintah karena setiap jiwa akan memiliki kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta lapangan pekerjaan.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan berbagai masalah baik itu pendidikan, kesehatan, kriminalitas dan sebagainya. Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang akan berpengaruh buruk pada tingkat kesejahteraan. Pengendalian jumlah penduduk akan sangat berdampak pada perencanaan pembangunan dan ketersediaan lapangan kerja. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius. Tidak meratanya distribusi penduduk menyebabkan pembangunan juga tidak merata.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

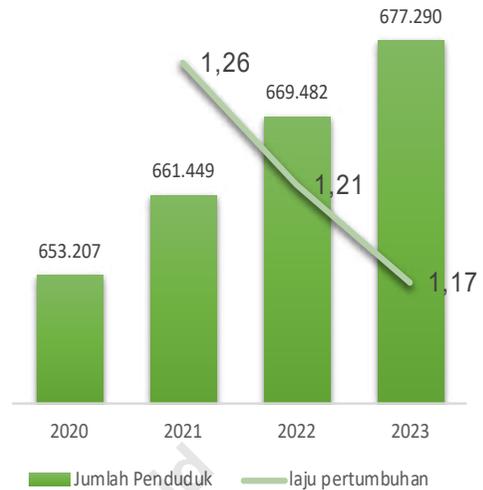
Menurut proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebanyak 723 ribu jiwa, setara dengan 10 persen penduduk Provinsi Riau. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang tertinggi kelima di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah serta kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang dilahirkan, dan disaat yang bersamaan pula akan dipengaruhi oleh kematian penduduk yang terjadi di setiap kelompok umur penduduk.

Dari hasil proyeksi penduduk 2020-2035, jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 yaitu sebanyak 677.290 jiwa. Jumlah penduduk bertambah sebanyak 7.808 jiwa dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 669.482 jiwa. Jumlah penduduk diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan yang positif. Namun laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 1,21 persen, dan pada tahun 2023 sebesar 1,17 persen.

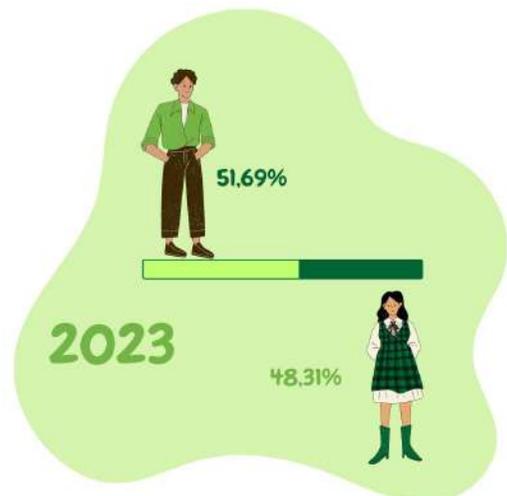
Adanya perlambatan laju pertumbuhan penduduk tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam menekan angka kelahiran dengan terus memberi edukasi tentang program keluarga berencana. Meskipun penurunan setiap tahunnya tidak signifikan namun mampu menekan angka pertumbuhan Kabupaten Indragiri Hilir.

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hilir selama 4 (empat) tahun terakhir selalu lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2023, peningkatan terjadi pada jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,06 persen dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,28 persen. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 106,98. Artinya di antara 100 jiwa penduduk perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Penduduk, 2020-2023



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

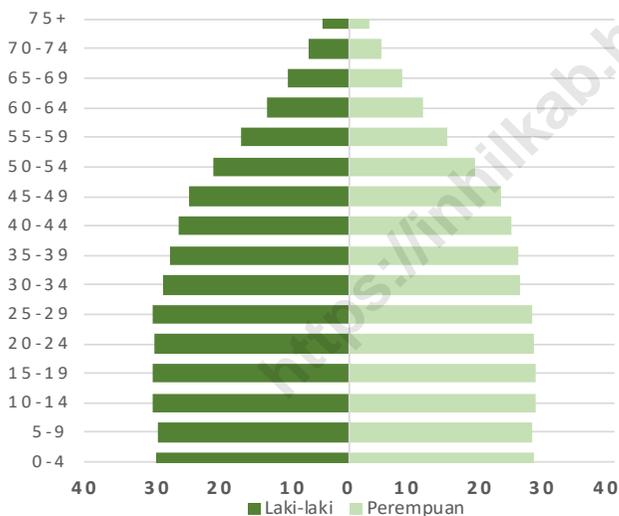
Gambar 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, 2023

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2022-2023

Indikator	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk (jiwa)	669,48	677,29
Laki-laki (jiwa)	346,41	350,07
Perempuan (jiwa)	323,07	327,22
Rasio jenis kelamin	107,23	106,98

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Komposisi dan Kepadatan Penduduk



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Gambar 1.3

Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

Piramida penduduk dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menganalisa komposisi penduduk. Dengan piramida penduduk, dapat diperoleh informasi penduduk laki-laki maupun perempuan untuk masing-masing kelompok umur, perubahan penduduk baik penambahan maupun pengurangan jumlah penduduk serta kecenderungan keadaan penduduk di masa yang akan datang.

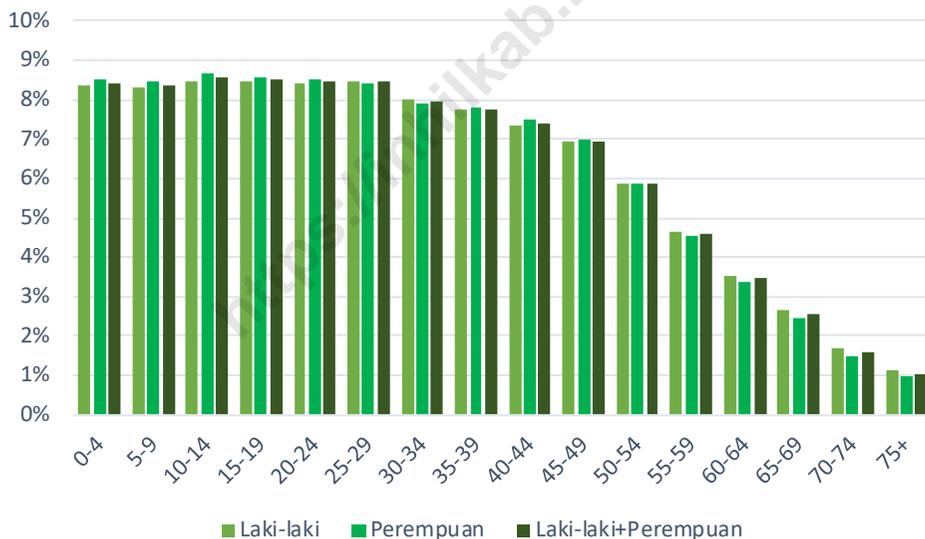
Piramida penduduk Indonesia menyerupai piramida penduduk muda (*expansive*), begitu pula penduduk Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berada dalam keadaan bertumbuh.

Wilayah dengan jenis piramida seperti ini perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya agar tercapai pemerataan sumber daya dan pembangunan.

Diketahui bahwa angka kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir masih tinggi, dimana piramida penduduk yang berusia 0-4 tahun dan 0-19 tahun masih melebar. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas tahun 2020 hingga 2023 cenderung meningkat setiap tahun dan selalu berada di atas angka pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia) Provinsi Riau. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia)

60 tahun keatas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2023, penduduk usia 60 tahun ke atas diproyeksikan sebanyak 58,70 ribu jiwa bertambah 3,27 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 55,42 ribu jiwa. Distribusi jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan demikian Kabupaten Indragiri Hilir sedang mengalami fenomena penuaan penduduk (*aging population*).

Dikutip dari buku *Wealth Management* (2007) karya Ubaidillah Nugraha, fenomena *aging population* terjadi dengan diiringi peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta adanya perbaikan di bidang pelayanan kesehatan. Fenomena *aging population* dapat diatasi dengan cara memperhatikan kesehatan penduduk usia lanjut, meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan, serta menguatkan peran keluarga dalam merawat penduduk usia lanjut. Tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan lansia, pemerintah juga berupaya untuk melaksanakan program pemberdayaan lansia. Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental, kognitif serta spiritual.



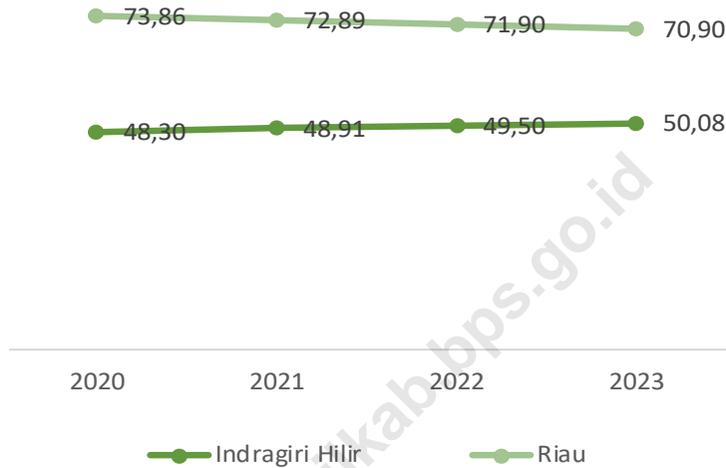
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Gambar 1.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat wilayah dan sebaliknya. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk mencapai 50,07 jiwa per km². Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 49,50 jiwa per km² atau terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1,17 persen. Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah.

Dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui bahwa Kecamatan Tembilahan sebagai ibukota kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Tembilahan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk untuk bekerja atau pun menetap. Sementara kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mandah dan Kecamatan Batang Tuaka.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Gambar 1.5
Perbandingan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau, 2020-2023

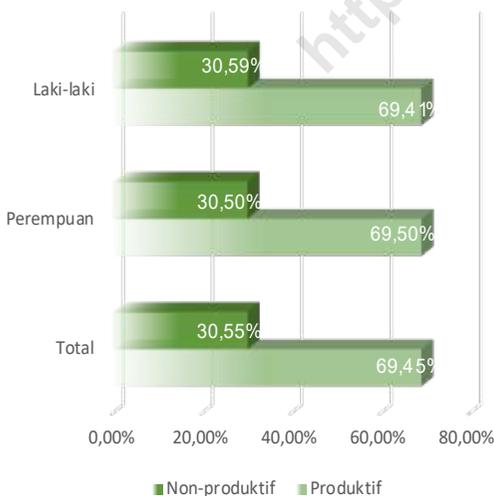
Kepadatan penduduk terjadi sebagai dampak kelahiran maupun migrasi secara terus menerus dalam suatu periode berjalan, sedangkan luas suatu wilayah memiliki kecenderungan yang tetap. Kepadatan penduduk yang berlebihan akan dihadapkan pada masalah-masalah sosial ekonomi, seperti masalah keterbatasan lahan pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, pada tahun 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 8,56 persen dari total penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan kelompok umur 75 tahun ke atas adalah penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 1,05 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Angka Beban Ketergantungan

Pertumbuhan penduduk akibat adanya penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif dapat menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk sebagai dampak penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan pembangunan (*source of growth*) dan juga sebagai pendongkrak perekonomian daerah (*engine of growth*).

Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035, dimana usia produktif diproyeksikan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang tinggi (sering kali disebut dengan bonus demografi) akan sangat menguntungkan dan meningkatkan peluang bagi suatu daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Bonus demografi diartikan secara sederhana sebagai peluang yang dinikmati suatu negara/wilayah sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif.

Penduduk usia produktif di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif baik laki-laki maupun perempuan. Ditengah upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempersiapkan SDM guna memanfaatkan kondisi terbukanya jendela peluang (*windows of opportunity*) sekarang ini. Dimana perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (15-60 tahun) atau angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Tersedianya proporsi penduduk usia produktif sebesar 69,45 persen merupakan proses transisi demografi hasil percepatan penurunan tingkat fertilitas dan meningkatnya kualitas kesehatan. Jendela peluang ini tidak boleh disia-siakan, agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja. Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 69,40 persen, sebaliknya terjadi penurunan angka beban ketergantungan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 44,10 persen.

Gambar 1.6
Persentase Penduduk Usia Produktif dan Usia Tidak Produktif, 2023

Tabel 1.2
 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia anak-anak (0-14 th)	25,11	25,59	25,34
Usia Produktif (15-64 th)	69,41	69,50	69,45
Usia tua (> 65 th)	5,48	4,91	5,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	44,08	43,89	43,99
Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Penduduk Muda	36,18	36,82	36,49
Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Penduduk Tua	13,66	12,57	13,13

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023 (diolah)

Semakin kecil angka beban ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Kondisi ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir karena ketika angka rasio ketergantungan rendah maka penduduk produktif dapat berperan maksimal apabila tersedia lapangan kerja yang cukup dan didukung kualitas SDM yang handal.

Angka beban ketergantungan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebesar 43,99 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Beban tanggungan penduduk muda berjenis kelamin laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan kelompok penduduk perempuan (36,18 persen berbanding 36,82 persen). Sementara untuk penduduk tua, angka beban ketergantungan laki-laki lebih besar dari pada perempuan (13,66 persen berbanding 12,57 persen).

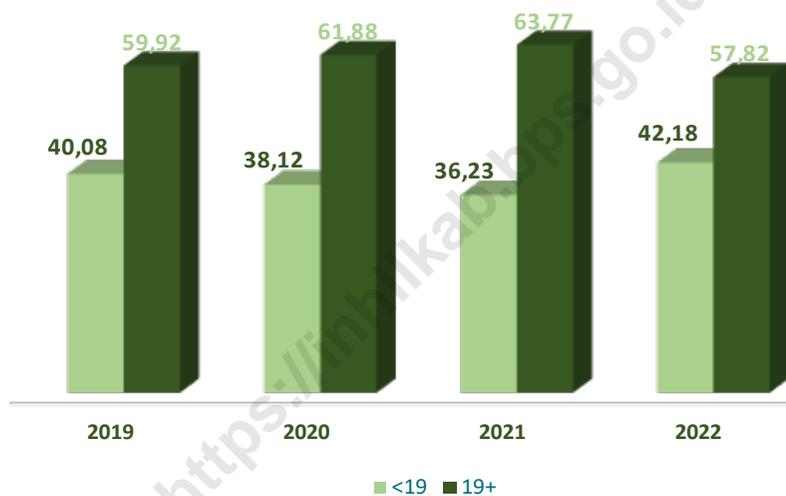
Perkawinan dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran

Pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk tidak lepas dari angka kelahiran. Angka kelahiran dipengaruhi oleh masa reproduksi perempuan. Semakin panjang masa reproduksi, maka kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan semakin banyak. Masa reproduksi perempuan dapat dihitung dari usia kawin pertama. Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belummatangnya rahim wani-

ta muda dalam proses perkembangan janin atau karena belum siap mental menghadapi masa kehamilan/ kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Di Indragiri Hilir, persentase penduduk perempuan berumur 10 ke atas yang pernah kawin di bawah umur 19 tahun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 42,18 persen. Sebaliknya pada tahun 2022, persentase penduduk perempuan berumur 10 ke atas yang pernah kawin di atas umur 19 tahun mengalami penurunan menjadi 57,82 persen. Perkawinan di bawah usia 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental, sosial, dan ekonomi belum siap dan biasanya belum mapan.

Selain pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2022 (diolah)

Gambar 1.7

Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 tahun ke atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2022

merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang memiliki berbagai macam jenisnya. Pemerintah mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk partisipasi KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu. Beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang memilih alat KB, seperti faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan

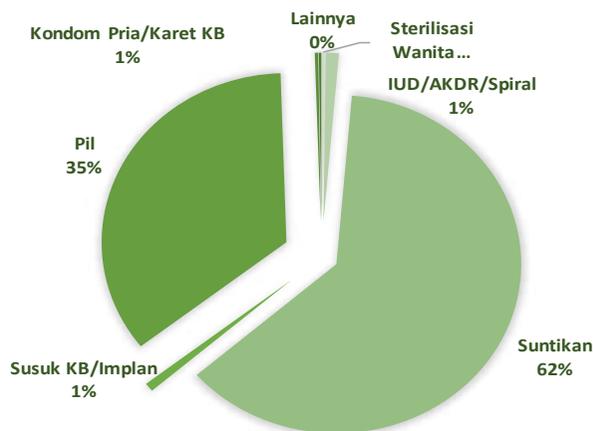


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2023 (diolah)

Gambar 1.8
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, dan faktor kenyamanan bagi penggunaanya.

Pada tahun 2023 persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin tapi tidak menggunakan KB adalah sebesar 22% dari total perempuan berumur 15-49 yang pernah kawin di Kabupaten Indragiri Hilir. Persentase tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,59 persen. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan berbagai alasan, antara lain adalah alasan fertilitas, tidak setuju KB, takut efek samping, tidak tahu, dan alasan lainnya. Berbagai alasan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi tentang program KB. Di Indragiri Hilir, alat KB yang paling banyak digunakan yaitu suntikan dan pil, tempat terbanyak memperoleh alat KB adalah praktik bidan/perawat dan puskesmas/pustu/klinik.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

Gambar 1.9
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

BAB II PENDIDIKAN

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

7-12 tahun **99,50%**

13-15 tahun **87,12%**

16-18 tahun **71,59%**

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

7,31
Tahun

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

99,50%

SEKOLAH DASAR
(SD)

75,40%

SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)

53,75%

SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

12,20
Tahun

II. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal sumber daya manusia. Salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan harus bisa menjadi figur bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi juga mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan mendorong kreatifitas dan daya inovatif generasi muda. Harapan ke depan generasi muda dapat menjadi agen inovasi yang memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sektor pendidikan berperan sangat strategis dalam mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai instrumen untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan pendidikan, salah satunya melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang mampu mendapatkan proses belajar yang efektif dan unggul, sehingga bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh kesempatan dan tantangan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat lebih terjamin dan mampu memajukan bangsa di dunia internasional.

Perkembangan Pendidikan

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga digunakan sebagai pengukur dimensi pengetahuan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Indragiri Hilir yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu tenaga pendidik.

HLS Indragiri Hilir tahun 2023 mencapai 12,20 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12,20 tahun atau lulus SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator untuk mengukur peluang pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2023, HLS Indragiri Hilir mencapai 12,20 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12,20 tahun atau lulus SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Terjadi kenaikan sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini bergerak dinamis sesuai regulasi pendidikan yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika kebijakan tentang pendidikan tidak berjalan semestinya, maka memungkinkan terjadinya penurunan angka HLS.

Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan angka HLS ini dengan terus mengedukasi penduduk tentang pentingnya pendidikan.



Gambar 2.1
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
di Kabupaten Indragiri Hilir, 2020-2023 (Tahun)

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2023 (diolah)

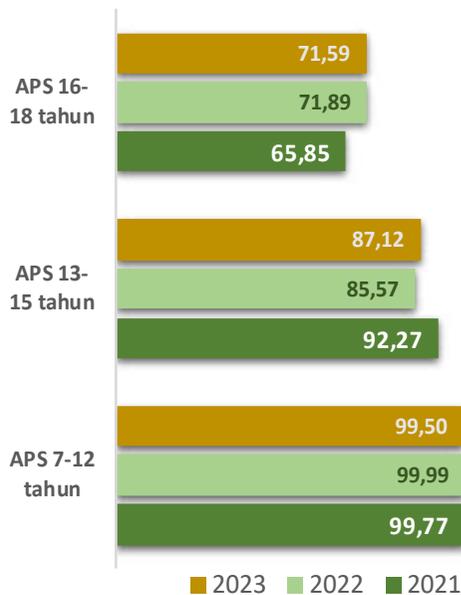
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas

karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk dimensi pengetahuan pada IPM. Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 sebesar 7,31 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,26 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Indragiri Hilir hanya mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP.

Pemerintah Indonesia bersama dengan dunia internasional telah berkomitmen untuk mencapai target SDGs dalam bidang pendidikan yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun target yang ingin dicapai yaitu menjamin semua anak di wilayah Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, sampai tahun 2030 dapat menyelesaikan SD-SMP. Dalam prosesnya, hingga tahun 2023 capaian tersebut dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini juga merupakan salah satu indikator capaian pendidikan selain HLS dan RLS. Tingkat partisipasi sekolah mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Beberapa ukuran tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

RLS tahun 2023 sebesar 7,31 artinya rata-rata penduduk di Indragiri Hilir hanya mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP.

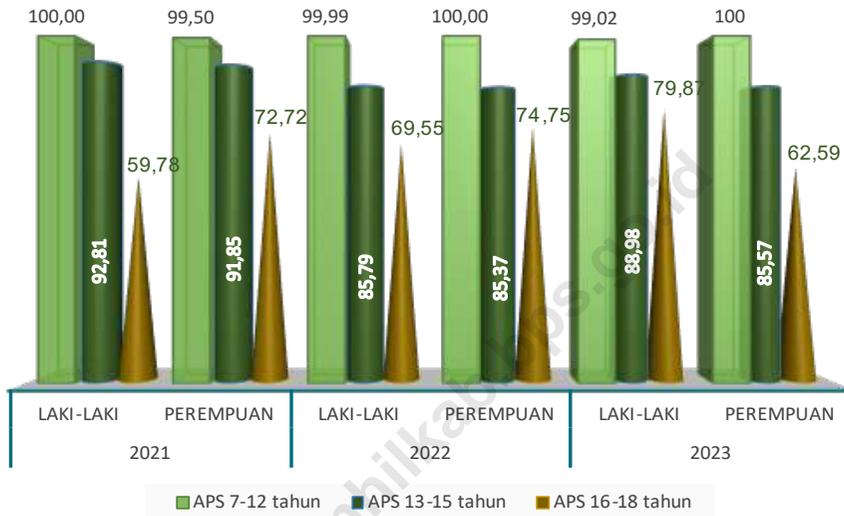
APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS Indragiri Hilir dalam kurun waktu satu tahun terakhir mengalami penurunan pada setiap jenjangnya, kecuali pada APS 13-15 tahun yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 87,12 persen setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 85,57 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar 92,27 persen.



Sumber: Susenas Maret, 2021-2023 (diolah)

Gambar 2.2
Perbandingan Total APS Menurut Umur, 2021-2023

Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS Indragiri Hilir semakin menurun, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi penduduk yang kemampuan ekonominya terbatas, ada kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disamping alasan lain seperti anak tidak minat sekolah, transportasi, dan sebagainya. Kondisi ini sangat sayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2021-2023 (diolah)

Gambar 2.3

Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023

APS Indragiri Hilir dalam kurun waktu tiga tahun mengalami sedikit perubahan. APS 7-12 tahun untuk laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,97 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,99 persen. APS 13-15 tahun untuk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,19 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 92,81 persen. Turunnya angka APS tersebut mengartikan bahwa semakin banyak anak laki-laki yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang dapat dilatarbelakangi karena membantu ekonomi keluarga. Sedangkan APS 13-15 tahun untuk anak perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 jumlah anak perempuan yang berusia 13-15 tahun yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan kembali mengalami peningkatan.

Selanjutnya APS 16-18 tahun untuk laki-laki mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengartikan bahwa

APS 16-18 tahun untuk laki-laki di Indragiri Hilir mengalami peningkatan setiap tahunnya

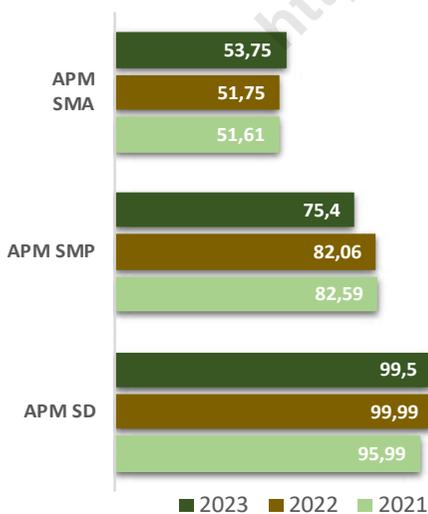
kesadaran akan pendidikan menamatkan sekolah menengah atas mulai bertambah, seiring permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal mempunyai ijazah sekolah menengah atas. Namun sebaliknya APS anak perempuan umur 16-18 tahun di Indragiri Hilir mengalami penurunan yang cukup dalam pada tahun 2023 yaitu sebesar 62,59 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 74,75 persen. Secara umum, kondisi tersebut menggambarkan bahwa anak perempuan cenderung tidak melanjutkan pendidikan setelah mengenyam pendidikan SMP. Hal ini dapat disebabkan mereka lebih memilih mengurangi beban ekonomi orang tua.

Tahun 2023, APS anak laki-laki kelompok umur 16-18 tahun di Indragiri Hilir lebih tinggi dari pada anak perempuan

APS digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, informasi yang digambarkan oleh APS ini tidak memperhitungkan anak pada kelompok yang bersekolah pada jenjangnya. Contohnya, APS pada jenjang usia 13-15 mengabaikan anak usia 15 tahun yang sudah bersekolah SMA/ sederajat. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur selain Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Oleh karena itu, untuk menggambarkan partisipasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, dapat menggunakan indikator APM.

APM menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan, karena sebagai gambaran semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkese-

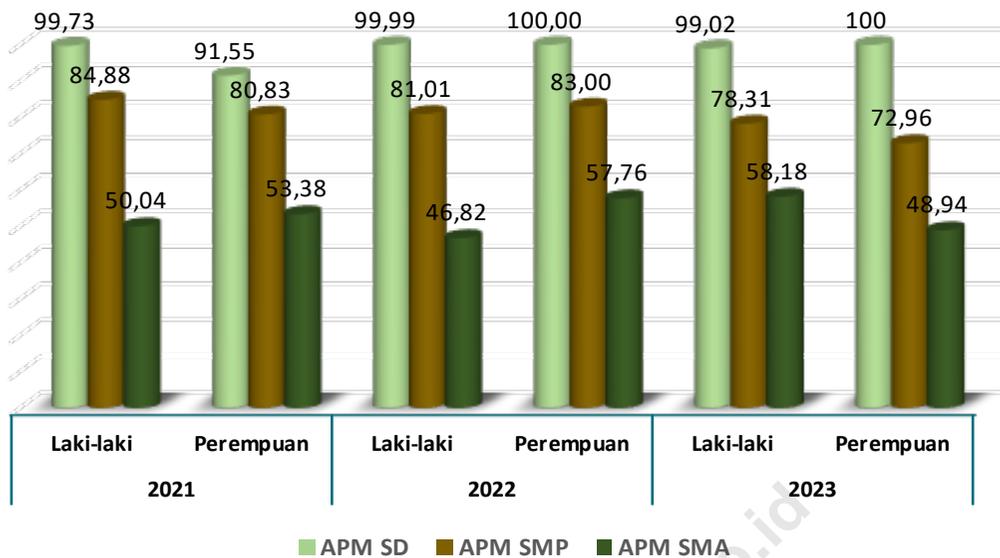
terataan. Sementara itu, APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu. APK dapat bernilai di atas 100 karena terdapat penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di luar kelompok usia yang seharusnya, misalnya anak yang belum mencukupi umur 7 (tujuh) tahun, namun sudah bersekolah.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2021-2023 (diolah)

Gambar 2.4
Perbandingan Total APM Menurut Umur, 2021-2023

Pola APM di Indragiri Hilir selama tiga tahun terakhir hampir sama dengan dengan pola APS dimana angka tertinggi berada pada jenjang SD/ Sederajat. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah. Rendahnya APM jenjang SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum merasakan pendidikan SMP/ Sederajat dan anak usia 16-18 tahun yang belum merasakan pendidikan jenjang SMA/ Sederajat.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2021-2023 (diolah)

Gambar 2.5

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023

Apabila dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin, APM SD untuk perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara APM SD untuk laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,97 persen dibandingkan tahun 2022. Kemudian APM SMP untuk laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Sementara APM SMA untuk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 11,36 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Sedangkan APM SMP dan APM SMA untuk perempuan mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

APM anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa anak laki-laki lebih 'tertib usia' dalam melanjutkan pendidikan hingga SMA. Pada tahun 2023, anak perempuan setelah mengenyam pendidikan SMP cenderung tidak melanjutkan pendidikan lagi. Hal tersebut dapat disebabkan karena mereka membantu dan mengurangi beban ekonomi orang tua.

Kemampuan Membaca dan Menulis

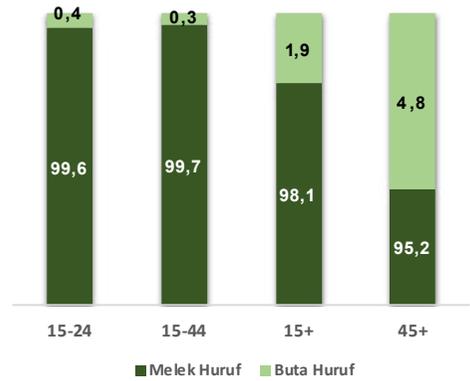
Membaca dan menulis merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang luas. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjangkau ilmu pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa karena sebagian besar aspek kehidupan manusia membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan baca-tulis penduduk dijadikan sebagai

ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Angka Melek Huruf (*literacy rate*) menjadi salah satu indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Ukuran angka melek ini diukur pada penduduk usia 15 tahun keatas karena pada usia tersebut dianggap sebagai masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2022, masih terdapat 1,9 persen penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf, dan terdapat juga 4,8 persen pada kelompok umur 45 tahun ke atas.

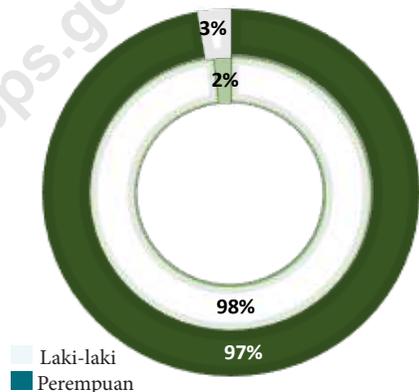
Hasil Susenas Maret 2023 terdapat 2,77 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin, dan masih terdapat 1,80 persen laki-laki 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin. Selain itu diketahui 76,44 persen perempuan berumur 15 tahun keatas mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya (huruf arab, cina dan lainnya), dan terdapat 79,70 persen laki-laki berumur 15 tahun keatas mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya.

Sementara persentase perempuan yang dapat membaca dan menulis huruf latin/alfabet sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun juga hampir mendekati 100 persen. Secara tidak langsung hal tersebut menyiratkan bahwa kemampuan membaca dan menulis laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini kurang baik, mengingat bahwa perempuan sebagai ibu maupun calon ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Seorang Ibu diharapkan dapat menjadi guru yang akan mendidik anak.



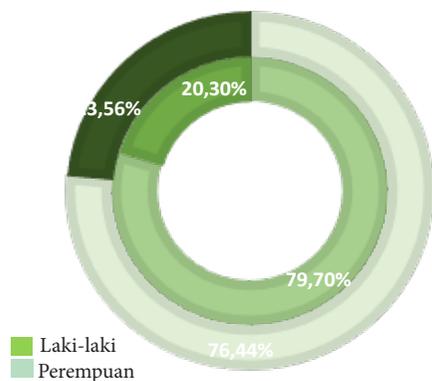
Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023 (diolah)

Gambar 2.6
Angka Melek Huruf Menurut Umur di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 2.7
Penduduk Berumur 15+ Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin, 2023

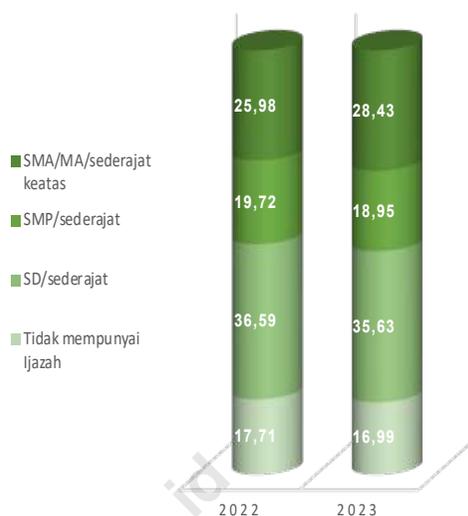


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 2.8
Penduduk Berumur 15+ Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, 2023

Contoh sederhana mengapa ibu harus dapat membaca dan menulis salah satunya yaitu untuk mengetahui standar gizi yang seimbang bagi anak. Hal semacam itu dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis karena mencari tahu tentang bagaimana mendidik anak yang baik tidak hanya sekedar asal mengikuti pemikiran dan paradigma lama tentang bagaimana seharusnya mendidik anak.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan 0,72 persen jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah, hal ini menjadi gambaran meningkatnya penduduk yang bersekolah/menamatkan sekolah minimal SD/ sederajat. Selain itu penduduk yang menamatkan SMA/MA/ Sederajat ke atas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 2,45 persen. Sementara itu, terjadi penurunan pada jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya menamatkan SMA hingga ke perguruan tinggi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2022-2023 (diolah)

Gambar 2.9
Penduduk Berumur 15+ Menurut Ijazah yang Ditamatkan, 2022-2023

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2023

Ijazah tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai Ijazah	15,61	18,45	16,99
SD/ sederajat	36,05	35,18	35,63
SMP/ sederajat	20,41	17,41	18,95
SMA/MA/ sederajat ke atas	27,93	28,96	28,43

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2023 (diolah)

Fasilitas Pendidikan

Salah satu sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Adapun beberapa arah kebijakan yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.

Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak.

Tabel 2.2
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD)	527	68.588	5.029
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	183	15.933	1.660
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	140	18.277	1.665
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	149	15.989	1.683
Sekolah Menengah Atas (SMA)	44	14.089	924
Madrasah Aliyah (MA)	67	8.044	914
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	19	4.918	503

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023

Jumlah sekolah di Indragiri Hilir untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 710 unit sekolah. Dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Indragiri Hilir sebanyak 236, dapat diasumsikan bahwa rata-rata di satu desa/kelurahan memiliki minimal dua atau tiga fasilitas Sekolah Dasar. Dengan tersedianya Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal.

Secara umum, jumlah sekolah di Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah ini juga harus didukung oleh akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat sehingga keberadaan sekolah ini mudah dijangkau. Peningkatan jumlah sekolah di setiap desa akan percuma jika fasilitas jalan buruk dan transportasi yang tidak tersedia, ditambah lagi dengan kondisi topografi Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah perairan.

Selain keberadaan sekolah, indikator lain yang menggambarkan kualitas pendidikan yang baik yaitu peranan guru dimana dalam proses pembelajaran guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat krusial. Seorang guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu menyerap ilmu yang diberikan, menjadi teladan yang baik, dan mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pentingnya peranan guru menjadikan posisi guru menjadi titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-kelas. Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Dengan kata lain, jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya 1 orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Asumsinya, rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Rasio murid-guru di Kabupaten Indragiri Hilir tahun ajaran 2020/2021-2022/2023 cenderung turun pada setiap jenjang pendidikan. Sebaliknya rasio guru-sekolah selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Tabel 2.3
Rasio Murid-Guru, Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Guru			Rasio Guru-Sekolah		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	13,37	13,63	13,64	10,26	9,81	9,54
MI	11,04	10,24	9,60	8,34	8,46	9,07
SMP	11,18	11,24	11,04	12,49	12,02	11,82
MTs	10,29	9,95	9,50	11,03	11,00	11,30
SMA	14,68	15,63	15,25	20,61	20,23	21,00
SMK	11,18	11,09	9,78	25,58	25,84	26,47
MA	10,75	10,14	8,80	13,36	12,53	13,64

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023

Rasio murid-guru di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, Sebaliknya rasio guru-sekolah selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Semakin rendah nilai rasio berarti jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu semakin terbatas, sebaliknya semakin besar rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, sehingga kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

BAB III KESEHATAN



PERSentase KELUHAN KESEHATAN

45,33 %



UMUR HARAPAN HIDUP

72,27
Tahun



ANGKA KESAKITAN

11,13%



III. Kesehatan

Menurut UU No.36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. *World Health Organization (WHO)* merumuskan kesehatan sebagai keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Kondisi ini adalah suatu keadaan ideal, dari sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas secara optimal.

Isu kesehatan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diintegrasikan dalam tujuan ke-3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Derajat Kesehatan

Kesehatan adalah syarat yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pendapatan yang layak. Penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga mampu mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kondisi sehat adalah wujud dari upaya berkesinambungan antara penduduk dan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan meningkatkan fasilitas serta akses kesehatan yang mudah, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, pondok bersalin desa dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Morbiditas ini dapat menjadi salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk secara umum. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022-2023 (diolah)

Gambar 3.1

Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu dan Angka Kesakitan, 2022-2023 (persen)

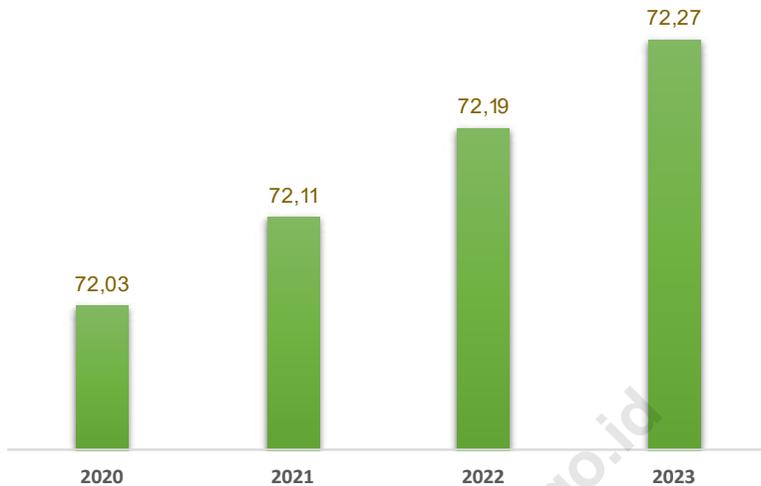
Terjadi peningkatan persentase jumlah keluhan kesehatan sebulan yang lalu tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan angka kesakitan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya baik untuk laki-laki atau pun perempuan. Pada tahun 2022-2023 keluhan kesehatan sebulan yang lalu dan angka kesakitan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Secara tidak langsung, kondisi ini memberikan *warning* kepada perempuan untuk lebih menjaga kesehatan.

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini merupakan salah satu tanda perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indragiri Hilir. Apabila penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini semakin banyak, masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat melemahnya resistensi. Kondisi kesehatan yang buruk selanjutnya akan berpengaruh terhadap usia harapan hidup dan mortalitas. Pada tahun 2023, sebanyak 45,33 persen orang mengeluhkan kesehatannya, hanya 37,83 persen diantara laki-laki yang berobat jalan dan 50,36 persen diantara perempuan yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Meningkatnya kualitas kesehatan, mendorong naiknya peluang hidup yang diharapkan oleh penduduk menjadi lebih panjang. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah batas usia yang diharapkan seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir.

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebesar 72,27 tahun



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, 2023 (diolah)

Gambar 3.2
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) , 2020-2023

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, selama kurun waktu 2020-2023, angka UHH Indragiri Hilir terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2023, UHH mencapai 72,27 tahun artinya seorang bayi baru lahir tahun 2023 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 72-73 tahun. Pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,11 persen bila dibandingkan tahun 2022.

Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap bagi bayi. ASI mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Banyaknya manfaat ASI bagi bayi mendorong pemerintah untuk menganjurkan seorang ibu supaya dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Setelah bayi berusia 6 bulan ke atas, bayi boleh diberikan dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 3.1

Penduduk Berumur 0-23 Bulan Menurut Apakah Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, 2022-2023

Tahun	Jenis Kelamin	Apakah pernah diberi ASI (persen)	Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	Laki-laki	86,52	11,17
	Perempuan	97,92	
	Jumlah	91,28	
2023	Laki-laki	95,36	9,68
	Perempuan	85,99	
	Jumlah	91,05	

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022-2023 (diolah)

Terjadi penurunan jumlah bayi 0-23 bulan yang pernah diberi ASI pada tahun 2023 sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran ibu akan pentingnya pemberian ASI kepada bayi menurun. Hal tersebut bisa saja terjadi akibat tidak lancarnya ASI yang dihasilkan oleh seorang Ibu atau pun penggunaan susu formula yang meningkat. Selain itu rata-rata lama pemberian ASI juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan mendapatkan kekebalan dari beberapa penyakit berbahaya, memperkecil resiko untuk sakit dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya.

Terjadi peningkatan jum-

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) menurut Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan, 2023

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap	39,55	28,92	34,00	
Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan	BCG	84,81	77,72	81,11
	DPT	72,82	64,43	68,44
	Polio	77,34	63,04	69,88
	Campak-Rubella (MR)/	63,64	58,1	60,75
	Hepatitis B	65,24	62,17	63,64

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

lah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,82 persen. Namun capaian imunisasi lengkap di tahun 2023 ini masih jauh dari angka 50 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah tentang edukasi pentingnya imunisasi pada anak balita serta penting adanya evaluasi terhadap program-program yang telah dilakukan.

Pola Hidup Merokok

Dalam teori Blum, faktor terbesar kedua yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat setelah faktor lingkungan sekitar yaitu perilaku kesehatan. Faktor ini setidaknya menyumbang kurang lebih 30 persen dari tingkat kesehatan manusia. Salah satu contoh sederhana dari perilaku yang sehat adalah dengan tidak merokok. Namun sayangnya, merokok kini seolah menjadi suatu trend, terutama bagi kaum laki-laki.



Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019-2023 (diolah)

Gambar 3.3
Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk Konsumsi Rokok, 2019-2023

Selama kurun waktu 2019 hingga 2022, pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk mengkonsumsi rokok setiap tahunnya cenderung meningkat. Meskipun sedikit turun pada tahun 2022, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,06 persen dibandingkan tahun 2022. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah konsumsi rokok tahun 2023, rata-rata rokok per minggu yang dihisap meningkat dari 120,20 batang pada tahun 2022 menjadi 124,64 batang atau dari 17,17 batang per hari menjadi 17,80 batang. Konsumsi terbesar adalah oleh penduduk dengan pengeluaran per kapita 20 persen ke atas yaitu 128,70 batang per minggu.

Tabel 3.3

Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Apakah Merokok Tembakau dan Rata-rata Rokok per Minggu yang dihisap (Batang), 2023

Uraian	Apakah merokok tembakau?		Rata-rata Rokok per Minggu yang Dihisap (batang)	
	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Distribusi pengeluaran per kapita	40% terbawah	27,19	72,81	117,16
	40% menengah	33,94	66,06	128,14
	20% teratas	29,36	70,64	128,70
Tamat SD ke bawah		32,84	67,16	124,68
Tamat SMP ke atas		27,84	72,16	124,58
Kabupaten Indragiri Hilir		30,47	69,53	124,64

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Seperti yang diketahui, bahwa rokok mengandung banyak racun penyebab berbagai penyakit, seperti kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan penyakit-penyakit lain hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya kandungan zat dalam rokok yang berbahaya, akan tetapi asap yang ditimbulkan juga menjadi polutan bagi lingkungan. Oleh karena itu, bahaya rokok tidak hanya mengancam penggunaannya, akan tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dalam perhitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), komoditas rokok menjadi komoditas penyumbang terbesar ketiga setelah makanan dan minuman jadi. Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli rokok sebenarnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi rumah tangga.

Fasilitas Kesehatan dan Pemanfaatannya

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 cenderung sama dengan tahun 2020, dimana terdapat 4 rumah sakit masing-masing di Kecamatan Reth dan Kateman,



Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023

Gambar 3.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan, 2021

serta 2 rumah sakit di Kecamatan Tembilahan. Berdasarkan hasil Podes BPS jumlah puskesmas di tahun 2021 adalah 29 unit, puskesmas pembantu dan apotek mengalami penambahan sebanyak 3 unit dibandingkan tahun 2020. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas.

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter sebanyak 70 orang dan jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 677.290 jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar sembilan ribu penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan di Indragiri Hilir. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Tabel 3.4
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

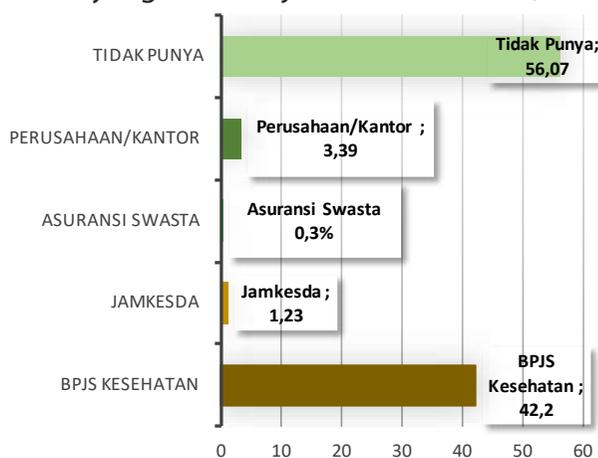
Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Dokter	70
Dokter Gigi	28
Perawat	558
Bidan	902
Tenaga Farmasi	52
Tenaga Kesehatan Masyarakat	95
Kesehatan Lingkungan	24
Tenaga Ahli Gizi	30
Ahli Laboratorium Medik	45

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023

Pada umumnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, disamping kesadaran pentingnya berobat ke fasilitas kesehatan.

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk memperoleh haknya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, diketahui jaminan kesehatan terbanyak yang dimiliki penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah BPJS Kesehatan.

Sedangkan pola berobat penduduk Kabupaten Indragiri Hilir cenderung sama antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya, yakni dengan mengunjungi praktik bidan dan puskesmas/pustu. Dipilihnya fasilitas ini karena lokasinya lebih mudah dijangkau, dan banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya juga lebih mudah dibandingkan di rumah sakit.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

Gambar 3.5
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2022

Tabel 3.5
 Persentase Penduduk yang Rawat Jalan dan Rawat Inap
 di Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2022

Fasilitas Kesehatan	Rawat Jalan		Rawat Inap	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit Pemerintah	4.76	2.15	61,8	39,33
Rumah Sakit Swasta	0.51	0.38	7,51	23,45
Praktek Bidan	51.46	25.37	8,84	0,00
Klinik/Praktek Dokter Bersama	8.87	10.17	5,3	14,94
Puskesmas	32.29	57.90	16,55	36,99
UKBM	2.3	0	0,00	0,00
Praktek Pengobatan Tradisional	6.52	4.74	0,00	0,00
Lainnya	1.04	0.81	0,00	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2021-2022

BAB IV

KONDISI KETENAGAKERJAAN



PENDUDUK USIA
15+ TAHUN

506,830 jiwa

Angkatan Kerja

307.740
jiwa

Bukan
Angkatan Kerja

199.090

Bekerja

98,29 %



Pengangguran

1,71 %



Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Usaha

Pertanian

47,33 %



Jasa-jasa

39,35 %



Manufaktur

13,32 %



Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kelamin



70,17 | 29,83

<https://inhilkab.b.go.id>

IV. Kondisi Ketenagakerjaan

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kesempatan kerja dapat menjadi salah satu indikator adanya proses pembangunan ekonomi. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi problem nasional yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga sangat berpotensi untuk pembangunan nasional.

Angkatan Kerja

Sumber daya manusia yang produktif dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun batas bawah usia kerja (*economically active population*) yaitu 15 tahun. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO), dalam konsep ini penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Indragiri Hilir terus mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2020, namun kembali turun pada tahun 2021 hingga 2023. Berlawanan arah dengan perkembangan jumlah penduduk bukan angkatan kerja, mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang beralih kegiatan dari bekerja menjadi ibu rumah tangga, pensiun, sekolah dan sebagainya.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Indragiri Hilir ta-



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018-2023 (diolah)

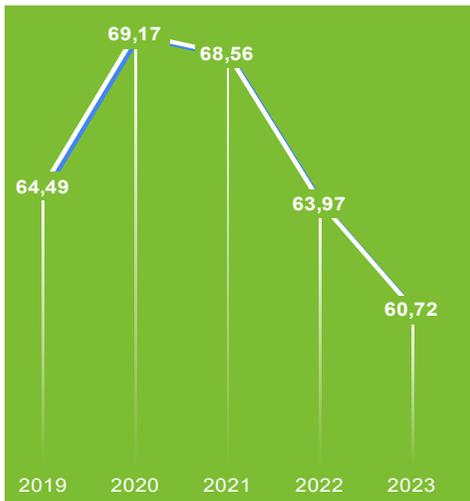
Gambar 4.1
Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, 2018-2023

ahun 2023 didominasi oleh laki-laki sekitar 215 ribu jiwa, menurun sebesar 8,52 persen dibandingkan jumlah angkatan kerja laki-laki tahun sebelumnya yaitu sekitar 236 ribu jiwa. Sebaliknya, jumlah penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja didominasi oleh perempuan sekitar 76,50 persen dari total penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja laki-laki terbentuk dari 98,96 persen laki-laki bekerja dan 1,04 persen pengangguran. Sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan terbentuk dari 96,71 persen perempuan bekerja dan 3,29 persen perempuan pengangguran. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor budaya dimana peran perempuan masih dituntut untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2022-2023 (diolah)

Gambar 4.2
Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2022-2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 4.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2019-2023

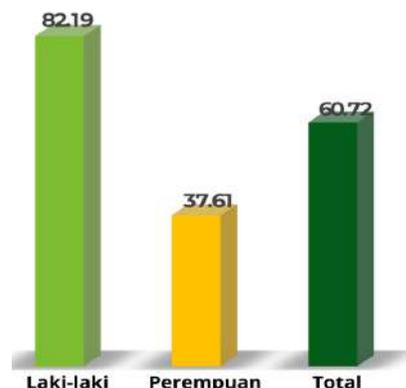
labour supply) semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting untuk digunakan sebagai bahan analisis dan ukuran capaian hasil pembangunan.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kenaikan TPAK Indragiri Hilir terjadi pada tahun 2020 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, terjadi penurunan 3,25 poin atau sebesar 5,08 persen dibandingkan tahun 2022. TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2023 sebesar 60,72 artinya dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 61 orang tersedia melakukan aktivitas ekonomi, dengan kata lain 60,72 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya 39,28 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan.

Selain keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi yang ditandai oleh indikator TPAK, serapan tenaga kerja dalam lapangan kerja juga perlu mendapatkan perhatian serius. Persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja sering disebut dengan TPT. TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Sedangkan TPT merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

Partisipasi angkatan kerja yang diukur dengan TPAK berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi angka TPAK menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 4.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, 2023

TPT
Indragiri Hilir
mengalami kenaikan
pada tahun 2023

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT di Indragiri Hilir pada tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, meski sempat naik pada tahun 2019. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan TPT di kabupaten Indragiri Hilir. TPT pada tahun 2023 adalah sebesar 1,71 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Penyerapan tenaga kerja di Indragiri Hilir tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja antara lain pertanian sebesar 143 ribu jiwa atau 47,33 persen, selanjutnya sektor jasa sebanyak 119 ribu jiwa dan manufaktur 40 ribu jiwa dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2023 (periode Agustus).

Sejalan dengan potret perekonomian di Indragiri Hilir yang memang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan kontribusi sekitar 46,1 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indragiri Hilir Tahun 2022. Dari sini tampak bahwa sebagai lapangan usaha yang mendominasi dalam perekonomian, pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar, karena lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha padat karya sehingga penyerapan tenaga kerjanya sangat baik.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, status pekerjaan terbanyak dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2023 persentase status pekerjaan penduduk laki-laki dibandingkan total angkatan kerja secara berturut-turut dari yang terbesar adalah penduduk laki-laki yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 20,32 persen, berusaha sendiri sebesar 18,76 persen, dan penduduk laki-laki dengan status pekerjaan pekerja bebas sebesar 11,81



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 4.5
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan, 2023

persen. Sedangkan persentase status pekerjaan penduduk perempuan yang terbesar adalah pada status buruh/karyawan/pegawai sebesar 9,50 persen, terjadi perubahan dari tahun 2022 dimana status pekerjaan terbanyak adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 8,78 persen. Namun secara umum, persentase penduduk bekerja dengan status pekerjaan terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai.

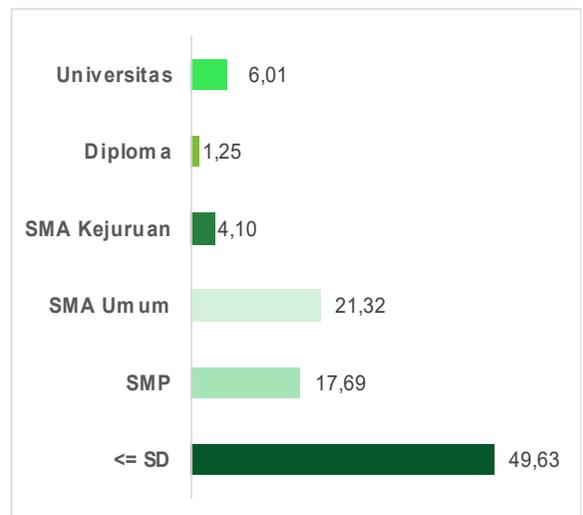
Tabel 4.1
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2020-2023

Status Pekerjaan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	27.25	22.16	21.37	27.64
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	16.56	16.53	18.38	12.77
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	3.61	3.50	3.93	3.56
Buruh/karyawan/pegawai	23.45	20.54	24.65	29.81
Pekerja bebas	16.43	20.22	15.75	13.40
Pekerja keluarga/tidak dibayar	12.69	17.06	15.92	12.82
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2020-2023 (diolah)

Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan

Perkembangan ketenagakerjaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, akan tetapi harus didukung juga dengan kualitas yang mumpuni. Kualitas SDM yang baik akan menjadi modal bagi Indragiri Hilir untuk bersaing di level nasional maupun internasional. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar tenaga kerja global. Sesuai dengan misi kelima Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 'Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Tawakal, Berakhlak Mulia, Profesional, Unggul, Berbudaya, dan Sehat Melalui Inovasi Ketenagakerjaan, Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan serta Kesejahteraan Sosial'.



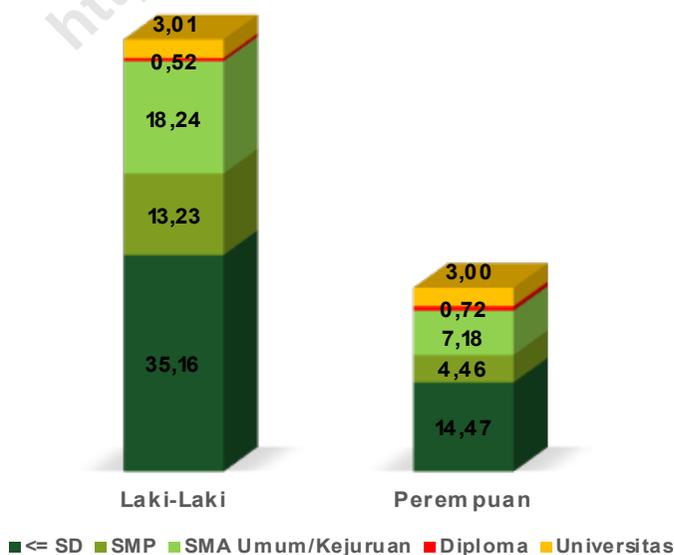
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 4.6
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, 2023

Angkatan kerja terbanyak yang tersedia pada tahun 2023 adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau pengangguran yang berpendidikan SD ke bawah. Seiring dengan serapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir terbanyak di sektor pertanian. Secara tidak langsung, komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan lapangan usaha ini menggambarkan bahwa potret tenaga kerja di Indragiri Hilir masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa angkatan kerja laki-laki di Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebesar 70,17 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 29,83 persen. Pada angkatan kerja laki-laki didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah, begitu juga pada angkatan kerja perempuan. Sementara itu serapan tenaga kerja berpendidikan SMA di Kabupaten Indragiri Hilir masih berkisar pada setengah dari total angkatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari jumlah pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir, yang terbanyak adalah pengangguran yang berpendidikan SMA umum.

Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang berpendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja untuk menafkahi keluarga, sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memilih pekerjaan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Mengingat bahwa lapangan usaha yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sektor pertanian yang tidak memandang pendidikan tenaga kerjanya. Maka tidak heran jika angkatan kerja di wilayah ini memiliki pendidikan yang rendah, hal ini karena peluang pekerjaan terbesar tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 4.7
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2023

BAB V

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA



57,01
persen

pengeluaran
penduduk
adalah untuk
MAKANAN



Rata-rata kebutuhan gizi
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
BELUM TERPENUHI



Konsumsi Kalori
Per Kapita Sehari

2048 kkal

Konsumsi Protein
Per Kapita Sehari

56,32 gr



V. Pola Konsumsi Rumah Tangga

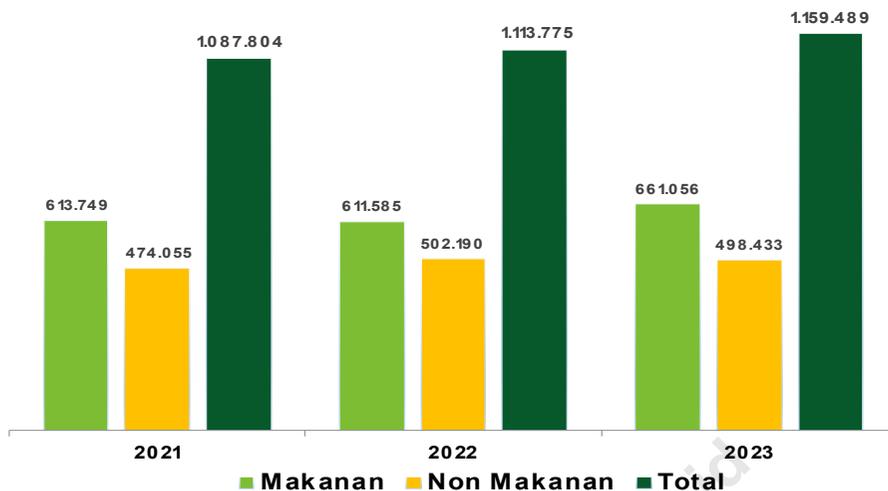
Perubahan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Keduanya akan membentuk pola kebiasaan tertentu dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada suatu kelompok masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan melalui besaran nilai rupiah yang dibelanjakan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dapat menunjukkan tingkat kemampuan daya beli yang selanjutnya akan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi daya beli masyarakat maka akan semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menunjukkan semakin sejahtera masyarakat tersebut.

Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka pengeluaran untuk non makanan cenderung semakin tinggi. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut cenderung berpenghasilan rendah. Pergeseran pola konsumsi terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pola Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar sudah cukup tinggi, yakni sebesar Rp 1.159.489 per bulan.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami kenaikan. Pada kelompok makanan terjadi penurunan pada tahun 2022, namun kembali naik pada tahun 2023. Sedangkan pada kelompok non makanan terjadi kenaikan pada tahun 2022, namun kembali turun pada tahun 2023. Secara agregat pengeluaran penduduk Indragiri Hilir untuk kebutuhan makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan. Jadi kontribusi terbesar dari rata-rata pengeluaran perkapita per bulan setiap tahunnya adalah dari kelompok makanan.

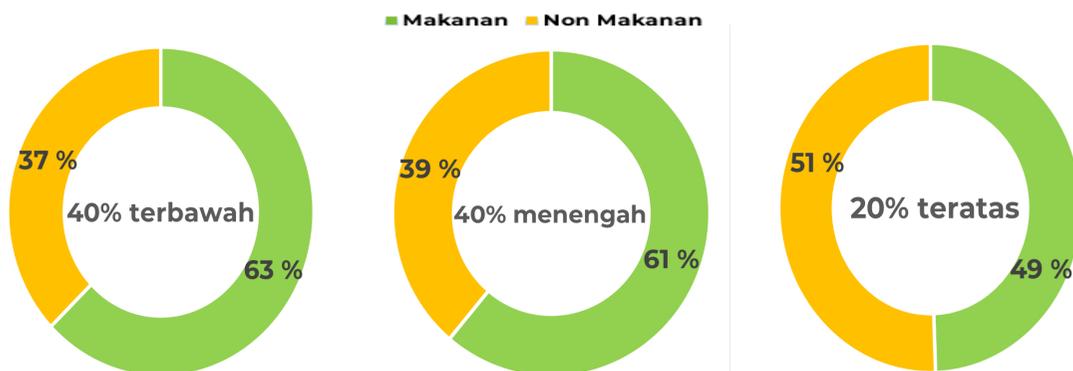


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020-2022 (diolah)

Gambar 5.1
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023

Jika dilihat berdasarkan kontribusi kelompok makanan maupun non makanan terhadap rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tahun 2023. Kontribusi kelompok makanan adalah sebesar 57,01 persen dan kelompok non makanan sebesar 42,99 persen, terjadi perubahan dibandingkan tahun 2022 dimana kontribusi kelompok makanan sebesar 54,91 persen dan kelompok non makanan sebesar 45,09 persen.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, masyarakat dengan distribusi pengeluaran perkapita sebulan 40 persen terbawah dan 40 persen menengah lebih banyak menghabiskan pengeluarannya untuk kebutuhan makanan, berbanding terbalik dengan masyarakat yang distribusi pengeluaran perkapita sebulan 20 persen teratas menghabiskan pengeluaran terbanyaknya untuk kebutuhan non makanan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 5.2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang memenuhi konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Adapun rata-rata kecukupan energi dan protein bagi masyarakat Indonesia masing-masing sebesar 2100 kkal per orang dan 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Tabel 5.1
Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021-2023

Tahun	Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Energi (Kkal)				
2021	1 702,96	2 207,56	2 579,57	2 080,59
2022	1 552,73	2 039,48	2 459,42	1 928,84
2023	1,652.33	2,151.11	2,632.78	2,048.14
Protein (Gram)				
2021	43,55	59,58	75,44	56,35
2022	39,92	55,32	75,04	53,11
2022	43.03	58.45	78.61	56.32

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir, 2021-2023

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, konsumsi kalori dan protein penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan, sebaliknya untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen menengah dan 20 persen teratas konsumsi kalori dan protein per harinya sudah terpenuhi. Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 rata-rata konsumsi kalori dan protein mengalami kenaikan. Namun secara agregat, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 hingga tahun 2023 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan.

Konsumsi kalori dan protein penduduk Indragiri Hilir belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan

BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

89,47 % Milik Sendiri

10,53 % Bukan
Milik Sendiri



Atap
Terluas *

**Seng :
87,29%**

Dinding Terluas *
Kayu/Papan
67,87%



*data tahun 2022



Kepemilikan
Fasilitas Buang Air Besar

87,35 %

Memiliki Fasilitas
BAB Sendiri



Jenis Kloset

72,40%

Menggunakan kloset
jenis Leher Angsa



VI. Perumahan dan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, penanaman budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Oleh karena itu, rumah yang layak juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang berkualitas. Pentingnya kelayakan rumah tinggal ini dapat terlihat dari perhatian dunia melalui salah satu tujuan dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang sering disebut Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tujuannya yang kesebelas yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, rumah juga menjadi salah satu indikator status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik atau semakin lengkap fasilitas rumah yang dimiliki. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal

Berdasarkan kepemilikan, pada tahun 2023 di Indragiri Hilir persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 89,47 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 86,98 persen. Pentingnya status kepemilikan rumah ini sebagai indikasi kesejahteraan masyarakat. Dengan menguasai rumah milik sendiri, diharapkan suatu rumah tangga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang telah mampu dipenuhi. Selain itu, dari sisi psikologis, status penguasaan rumah milik sendiri akan memberikan ketenangan bagi penghuninya dibandingkan dengan menempati rumah sewa atau bebas sewa.

Tabel 6.1
Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan, 2020-2022 (persen)

Indikator Perumahan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas lantai terluas bukan tanah dan lainnya	99,65	99,02	98,31
Luas lantai perkapita ≥ 10 m ²	81,58	83,72	82,17
Dinding terluas tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, Kayu/papan, batang kayu, bambu, anyaman bambu	97,59	93,99	95,33
Atap terluas beton, genteng, seng	90,23	90,46	90,94
Status kepemilikan bangunan tempat tinggal	83,00	82,73	86,98
Rata-rata jumlah keluarga dalam bangunan sensus	1,12	1,29	1,15

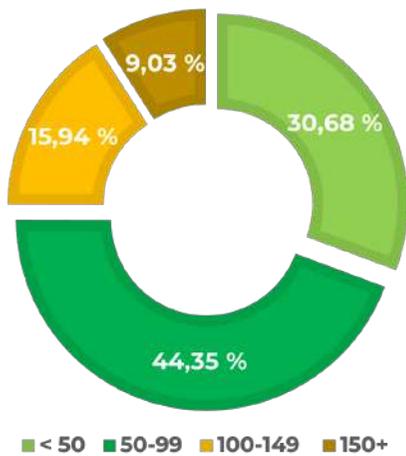
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020-2022 (diolah)

Terkait kualitas, kelayakan rumah tempat tinggal perlu dilihat dari komponen material pembentuknya seperti luas lantai hunian, jenis atap, lantai dan dinding. Setiap komponen pembentuk rumah turut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal tersebut.

Pada tahun 2022, terdapat 17,83 % penduduk yang luas lantai hunian per orangnya kurang dari 10 m²

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2017).

Pada tahun 2022 di Indragiri Hilir terdapat 9,06 persen rumah tangga yang menggunakan atap asbes, bambu/kayu/sirap, jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya. Sedangkan untuk lantai, masih terdapat 1,69 persen rumah tangga yang lantai terluasnya adalah tanah dan lainnya, serta 17,83 persen penduduk yang luas lantainya kurang dari 10 m² (per orang). Namun secara general, luas lantai rumah terbanyak yang dihuni oleh rumah tangga di wilayah ini adalah 50-99 m².



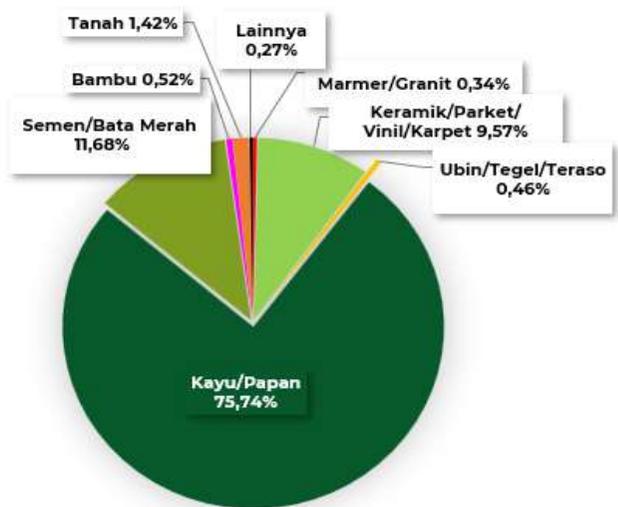
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah (m²), 2022

Hal ini menunjukkan indikasi peningkatan jumlah penduduk mengimbangi peningkatan luas lantai yg dihuni rumah tangga pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 (43,32 persen). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga sehingga tingkat kelayakan tidak cukup dilihat dengan luas rumah dalam sebuah rumah tangga. Namun, penting untuk melihat jumlah anggota rumah tangga yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu kelayakan rumah lebih mudah diukur dengan luas hunian per kapita. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit.

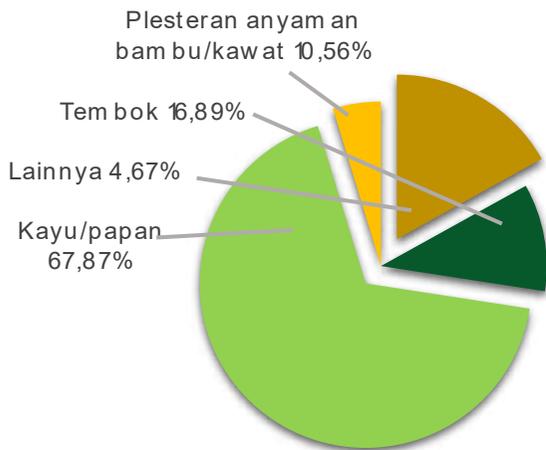
Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Jenis lantai rumah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Lantai rumah yang baik adalah lantai rumah yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Jenis lantai yang memenuhi kriteria tersebut yaitu lantai yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah. Lantai tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria lantai yang sehat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Di Indragiri Hilir, mayoritas rumah tangga menghuni rumah dengan lantai terluas kayu/papan, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2021: 75,72 persen). Sebagian besar rumah di wilayah ini berupa rumah panggung yang mengusung konsep arsitektur vernakular. Adapun arsitektur vernakular didefinisikan sebagai gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, tradisi lokal dan ketersediaan bahan bangunan. Rumah panggung merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap banjir pasang surut air sungai atau air laut yang sering terjadi dan penye-



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

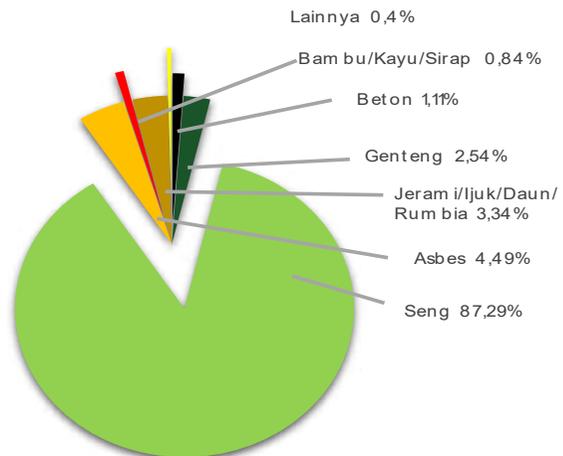
Gambar 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Lantai Rumah Terluas, 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

Gambar 6.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Dinding Rumah Terluas, 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022 (diolah)

Gambar 6.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Atap Rumah Terluas, 2022

suain terhadap daerah rawa dengan jenis tanah gambut. Seiring dengan material lantai terluas rumah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kayu, material terluas untuk dinding di tahun 2022 juga sama yaitu kayu. Sementara untuk atap, penggunaan terbanyak untuk atap rumah terluas tahun 2022 adalah seng, mengalami peningkatan dari sebelumnya yang tercatat sebesar 86,98 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tempat tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Dalam tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, salah satu indikator yang digunakan yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih, layak dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam tujuan keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, ketersediaan sumber air minum bersih, layak dan berkelanjutan ini juga menjadi salah satu indikator. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah ketersediaan air minum layak dan bersih bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penduduk yang memanfaatkan listrik PLN bergerak ke arah positif. Seiring dengan peningkatan jumlah jaring-

Tabel 6.2
Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2020-2022 (persen)

Fasilitas Perumahan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	73,08	77,04	85,73
Air minum bersih	30,44	29,11	30,41
Air minum layak	65,69	89,60	88,76
Jamban sendiri/bersama dengan tangki septik, IPAL dan lubang tanah	79,61	72,18	94,59
Memasak menggunakan LPG	78,36	76,68	86,56

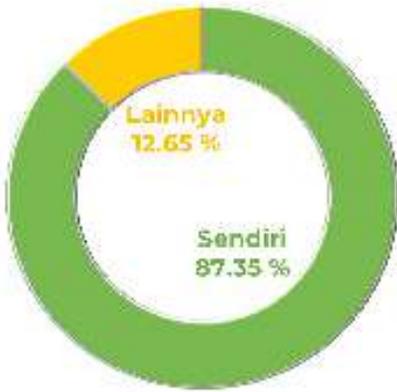
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020-2022 (diolah)

gan listrik dan adanya pembangunan PLTU pada tahun 2021, sehingga produksi listrik meningkat dan jangkauannya lebih luas hingga ke kecamatan yang jauh. Meskipun masih terdapat 14,27 persen penduduk yang belum mendapat fasilitas tersebut, dengan kata lain masih terdapat penggunaan listrik swadaya sebesar 9,71 persen dan 4,57 persen bukan listrik/lampu minyak.

Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m). Sedangkan air minum layak meliputi air leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m). Di Indragiri Hilir, jumlah penduduk yang menggunakan air minum layak cenderung meningkat setiap tahun. Namun pada tahun 2022, masih ditemukan 11,24 persen penduduk yang belum menggunakan air minum layak. Selanjutnya, jumlah penduduk yang belum menggunakan air minum bersih masih sangat banyak, tercatat dalam tiga tahun terakhir berkisar antara 69-70 persen dari jumlah penduduk. Hal ini hendaknya agar menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2022, terdapat 69,59% penduduk yang belum menggunakan air minum bersih

Selanjutnya, fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya ketersediaan sarana jamban. Dilihat dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

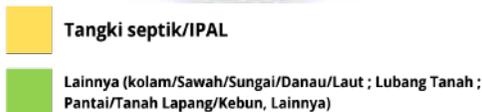


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 6.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, jamban sehat memiliki beberapa kriteria yaitu bangunan atas jamban (memiliki dinding dan/atap), bagian tengah jamban dilengkapi konstruksi kloset jenis leher angsa, lubang tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus ditutup, lantai jamban harus punya saluran pembuangan tinja, dan bagian bawah dapat berupa tangki septik/IPAL, dan cubluk berupa lubang tanah.

Di Indragiri Hilir pada tahun 2023, masih terdapat 12,65 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar (jamban) milik sendiri. Kemudian dari jumlah penduduk yang memiliki jamban, terdapat 72,40 persen penduduk menggunakan kloset leher angsa, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 68,71 persen. Sedangkan penggunaan jenis kloset lainnya yang meliputi plengsengan dan cemplung/cubluk pada tahun 2023 sebesar 27,60 persen turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 31,29 persen.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 6.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2023

Informasi lainnya tentang perumahan yaitu mengenai bahan bakar memasak, pada tahun 2022 terdapat 86,56 persen penduduk yang menggunakan LPG, 13,01 persen menggunakan minyak tanah/briket/arang/kayu bakar, 0,18 persen menggunakan listrik dan 0,26 persen tidak memasak di rumah.

BAB VII KEMISKINAN

5,64%

PERSENTASE
PENDUDUK
MISKIN

JUMLAH
PENDUDUK
MISKIN

40.860
Jiwa

HELP!



GARIS
KEMISKINAN

RP597.122



0,68

INDEKS
KEDALAMAN
KEMISKINAN

0,13

INDEKS
KEPARAHAN
KEMISKINAN

VII. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, akan tetapi kondisi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan seperti mata rantai yang bisa menjadi sebab, sekaligus menjadi akibat dari masalah sosial dan ekonomi lainnya. Tidak hanya pada level mikro, masalah kemiskinan ini juga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi secara makro.

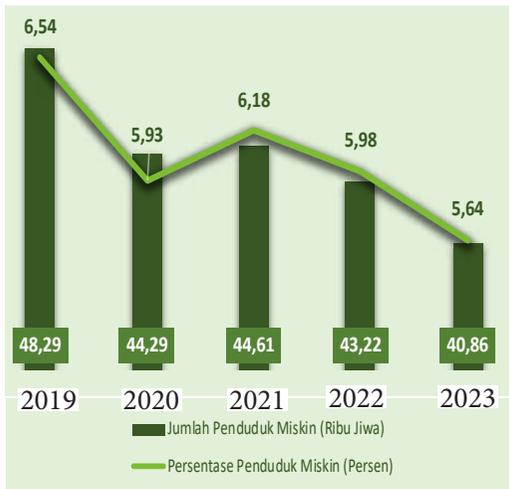
Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya dilihat berdasarkan standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan absolut merupakan standar hidup minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi menjadi prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket-paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pengentasan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Kemiskinan seperti lingkaran yang membelenggu dimana ini menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari rendahnya kualitas kehidupan manusia. Kompleksnya masalah kemiskinan, menjadikan masalah ini tidak mudah untuk dituntaskan.



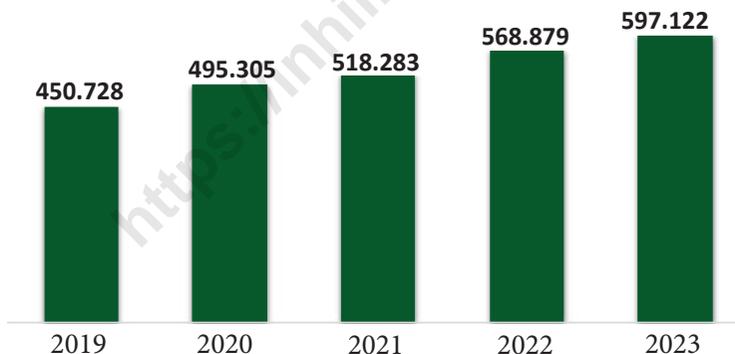
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 7.1

Jumlah (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (persen), 2019-2023

Berbagai program baik di level nasional maupun daerah melalui Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) dan sebagainya telah dilakukan dalam mewujudkan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir, terjadi kenaikan pada tahun 2021 namun kembali turun pada tahun 2022 dan 2023.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan



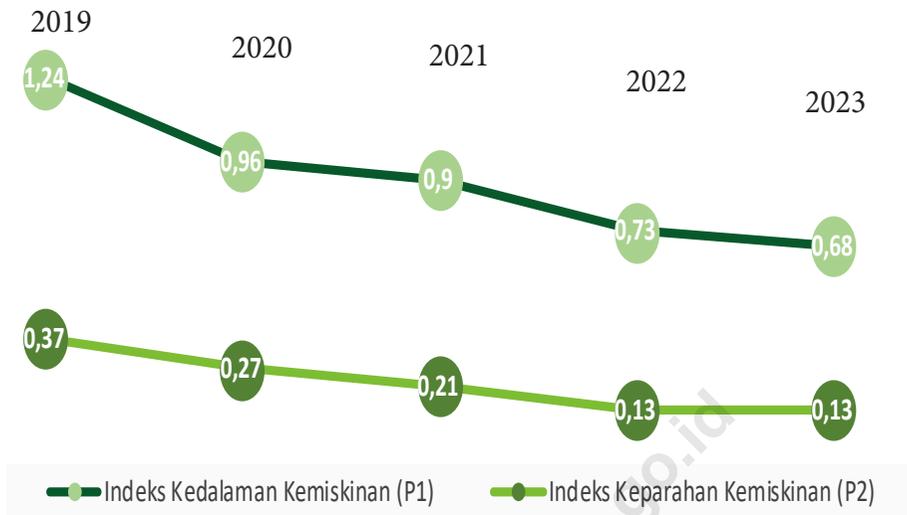
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 7.2

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2019-2023

kan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2023 tercatat Rp 597.122 per kapita/bulan mengalami kenaikan sebesar 4,96 persen dari tahun 2022, artinya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan sebesar Rp 597.122 per bulan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Gambar 7.3
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, 2019-2023

Indikator kemiskinan lain yang perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, P1 dan P2 di Kabupaten Indragiri Hilir cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengendalikan angka kemiskinan kabupaten. Nilai P1 pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,05 poin dibandingkan tahun 2022. Sedangkan nilai P2 Tahun 2023 masih sama seperti tahun sebelumnya atau tidak mengalami perubahan.

Karakteristik Penduduk Miskin

Pembahasan kemiskinan tidak terlepas dari masalah pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Dengan pendidikan tinggi, idealnya seseorang akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi pula.

Tabel 7.1
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2021-2023

Pendidikan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
< SD	25.12	23.10	8.23
Tamat SD/SMP	66.03	62.33	75.36
>SMA	8.86	14.56	16.41

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021-2023

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD mengalami penurunan yang begitu signifikan jika dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Hal berbeda terjadi pada persentase penduduk miskin yang menamatkan jenjang pendidikan SD/SMP dan SMA yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, di Kabupaten Indragiri Hilir karakteristik penduduk miskin usia 15 tahun ke atas secara umum didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tamat SD/SLTP diikuti oleh penduduk yang tamat SMA ke atas kemudian penduduk yang tidak tamat SD.

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, nilai persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini bisa saja disebabkan adanya penurunan rata-rata anggota rumah tangga pada penduduk miskin dan penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Tabel 7.2
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2021-2023

Status Bekerja	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Bekerja *)	42.30	55.59	47.17
Bekerja di Sektor Informal	46.47	32.23	41.50
Bekerja di Sektor Formal	11.23	12.18	11.33

Catatan: *) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021-2023

Menurut lapangan pekerjaan, pada tahun 2023 persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan bukan di sektor pertanian mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki, penduduk miskin memiliki kecenderungan untuk memilih sektor informal karena lebih mudah diakses meskipun dengan penghasilan yang rendah. Hal itulah yang menjadi penyebab persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin yang bekerja di sektor bukan pertanian pada tiga tahun terakhir.

Tabel 7.3
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Sektor Bekerja, 2021-2023

Sektor Bekerja	2021	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Bekerja *)	42.30	55.59	47.17
Bekerja di Sektor Pertanian	40.02	33.70	36.81
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	17.68	10.71	16.03

Catatan: *)termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021-2023

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

**PERSENTASE RUMAH
TANGGA YANG
MENERIMA KREDIT**

10,42%

16,84%

**MENGGUNAKAN TELEPON
SELULER/HP TETAPI
TIDAK MEMILIKI TELEPON
SELULER/HP**



**PERSENTASE PENDUDUK
YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN**

**KARAKTERISTIK
PENDUDUK >5 TAHUN
DALAM MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI**

78,98%

55,88%



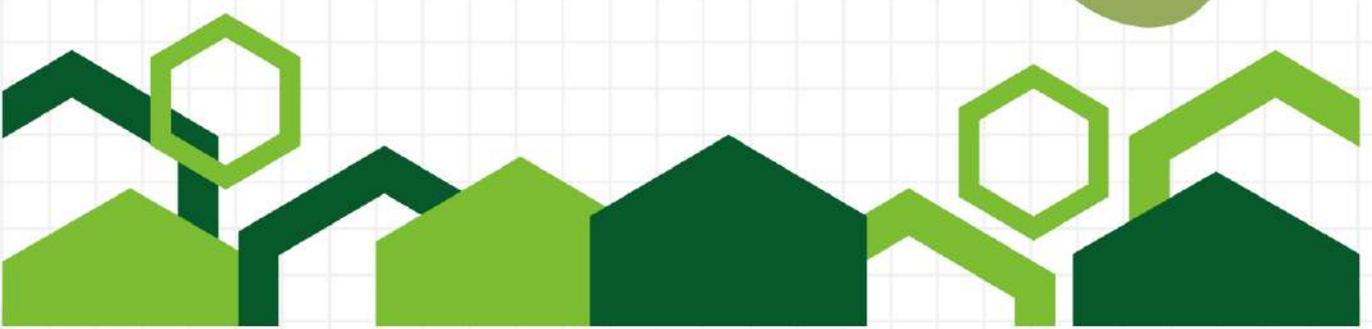
**TELEPON SELULER (HP)
ATAU KOMPUTER**

INTERNET



0,55%

0,27%



VIII. Sosial lainnya

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini tampak merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Seiring dengan perubahan yang terjadi, tingkat kebutuhan manusia mulai mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, kini telah berubah menjadi kebutuhan primer. Contoh sederhana seperti kebutuhan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, berlibur atau berwisata, bahkan eksistensi di tengah masyarakat pun kini menjadi kebutuhan. Hal tersebut tidak lagi terpisahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum sehingga menjadi wajar apabila indikator sosial semacam itu kini menjadi salah satu pengukuran perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berkembang begitu pesat. Perkembangan ini menjadi salah satu pendorong arus globalisasi. Di era TIK yang semakin canggih dan mudah diakses, jarak tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar individu maupun antar lembaga atau usaha.

Ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap TIK ini akan mempengaruhi pergerakan manusia dalam berbagai urusan, baik itu urusan antar individu, urusan pemerintahan, bisnis, politik, serta urusan yang lainnya. Secara otomatis, akses terhadap TIK ini menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah.

Salah satu tantangan pembangunan negara dengan wilayah yang luas seperti Indonesia yaitu penyediaan layanan infrastruktur yang merata untuk memudahkan konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara cepat. Layanan infrastruktur yang dibutuhkan ini tidak hanya tentang pembangunan secara fisik seperti jalan dan transportasi, akan tetapi infrastruktur pendukung akses terhadap TIK juga sangat penting untuk diprioritaskan.

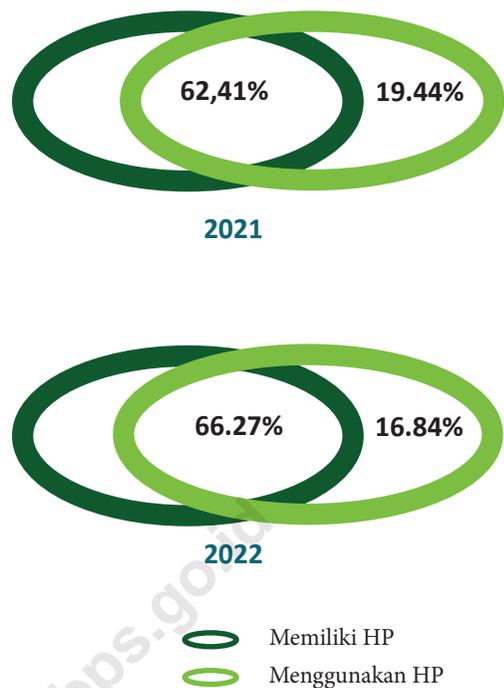
Kemajuan TIK ini memberikan manfaat yang sangat positif bagi masyarakat. Jika ini dapat dikembangkan dengan optimal, akan dapat mengdongkrak kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses TIK, diharapkan kehidupan akan terus bergerak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan dan memiliki telepon seluler (HP) pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak menggunakan telepon seluler (HP) dibanding

ingkan penduduk perempuan selama dua tahun terakhir. Peningkatan ini memberi gambaran bahwa telepon seluler semakin dibutuhkan masyarakat dalam kesehariannya.

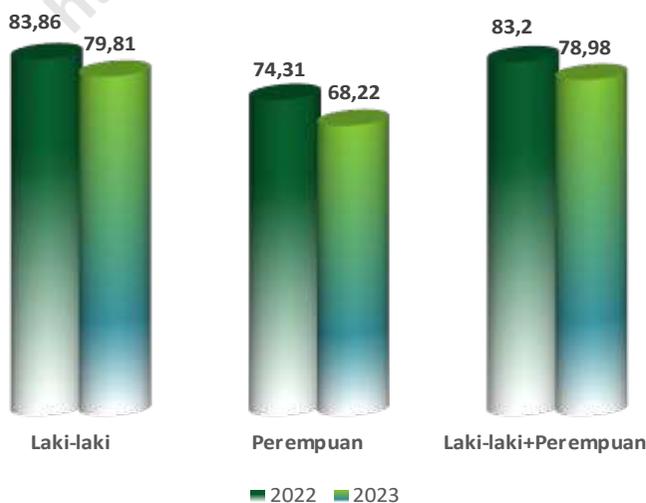
Sepanjang tahun 2020-2021 dalam masa pandemi Covid-19 penggunaan TIK di kalangan masyarakat juga berkembang pesat. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan yang mewajibkan setiap pelajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Pembelajaran di masa pandemi memanfaatkan aplikasi atau web yang disebut dengan *e-Learning* yaitu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer.

Selain menggunakan media e-learning ini, siswa dan pengajar juga menggunakan sarana media Whatsapp, Telegram, dan media *video conference* seperti Zoom, Google Meet, dll. Aplikasi ini digunakan sebagai forum diskusi, konsultasi pembelajaran, dan mengerjakan tugas. Selain karena



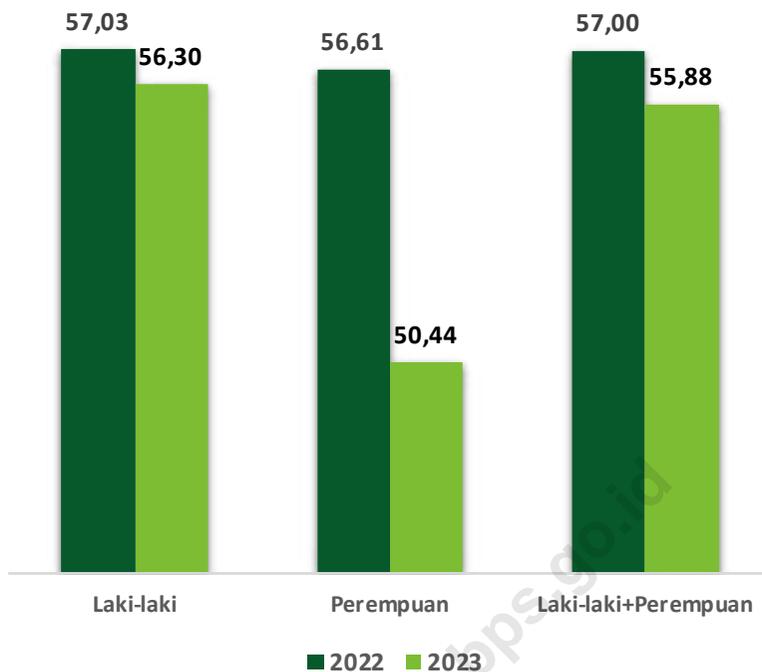
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2021-2022 (diolah)

Gambar 8.1
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan dan Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir, 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret, 2022-2023 (diolah)

Gambar 8.2
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Notebook/Desktop/Laptop/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret, 2022-2023 (diolah)

Gambar 8.3
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2022-2023

memang terjadi transformasi digital pada kegiatan pembelajaran, peningkatan penggunaan TIK pada masa pandemi Covid-19 juga disebabkan oleh faktor kejenuhan. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan interaksi sosial masyarakat terganggu. Akibatnya, penggunaan sosial media kian meningkat sebagai pilihan untuk menggantikan interaksi sosial yang sebelumnya dilakukan.

Kemudahan akses jarak jauh yang didukung TIK pada tahun sebelumnya berlanjut hingga tahun 2022. Demi efisiensi anggaran, pertemuan dan pelatihan diselenggarakan kembali secara daring. Sehingga penggunaan internet tahun 2022 mengalami peningkatan. Seiring berjalannya waktu, keadaan sosial yang telah bertransformasi akibat Covid-19 kembali menuju keseimbangan. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya memanfaatkan kemajuan TIK, kini secara normal kembali ke masa sebelumnya. Akibatnya, pada tahun 2023 penggunaan telepon seluler, komputer, dan internet mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tindak Kejahatan masih perlu Diwaspadai

Rasa aman dan nyaman dari tindak kejahatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat penting bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya akibat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dilansir dari www.indragirione.com, pada tahun 2022 di Indragiri Hilir terdapat angka kriminal 3C (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor) sebanyak 59 kasus setelah tahun 2021 terdapat 48 kasus, narkoba 96 kasus berbanding 66 kasus pada tahun sebelumnya. *Index crime* terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan (curat) 34 kasus. Selanjutnya laka lantas 50 kasus pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 54 kasus, dan laka langgar 5.302 kasus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 2.179 kasus.

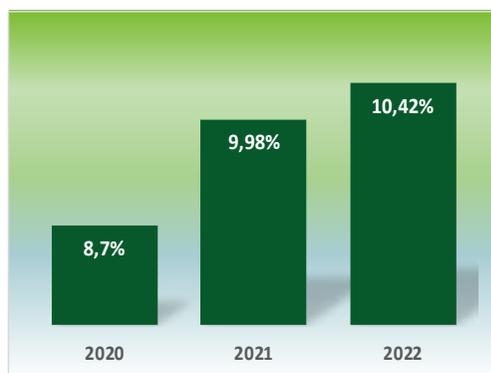
Tabel 8.1
 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya, 2020-2021

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	0,28	0,07	0,18
2021	0,55	0,27	0,42

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2021-2022

Penerima Kredit Usaha

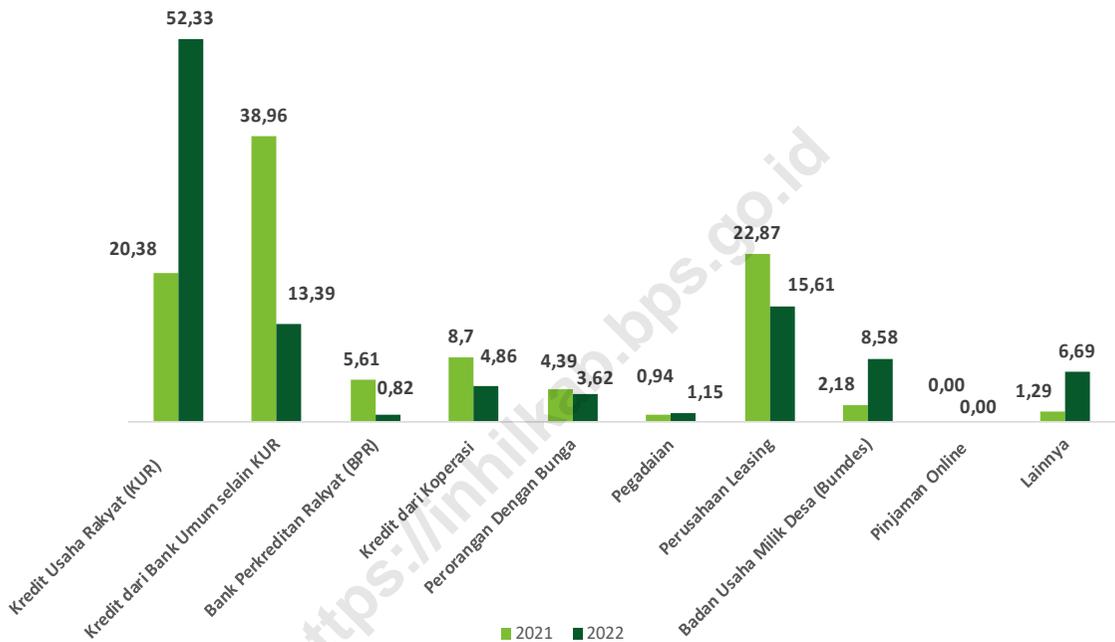
Aliran dana kepada masyarakat berupa kredit usaha dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020-2022 (diolah)

Gambar 8.4
 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir, 2020-2022

Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah rumah tangga yang menerima kredit cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Indragiri Hilir, pada tahun 2022 jenis kredit yang banyak diperoleh adalah Kredit Usaha Rakyat, dan tahun 2021 kredit dari bank umum selain KUR. Kredit Usaha yang dimaksud dapat berbentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Kredit Modal Kerja dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis, sedangkan Kredit Investasi lebih diarahkan untuk pengadaan barang modal jangka panjang.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2021-2022 (diolah)

Gambar 8.5
 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit, 2021-2022

DAFTAR PUSTAKA



- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2021. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2018. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022. Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2021. Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2021. Tembilahan: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2022. Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2022. Tembilahan: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2023. Indragiri Hilir dalam Angka Tahun 2023. Tembilahan: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2023. Survei Angkatan Kerja Nasional Maret 2023. Tembilahan: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2023. Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023. Tembilahan: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Pedoman Pembuatan Publikasi BPS Edisi 2023. Jakarta: BPS.

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://inhilkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Jl. Praja Sakti (Bunga) No. 11 Tembilahan Hilir
Telp. (0768)22489 - email: bps1403@bps.go.id
Homepage: inhilkab.bps.go.id

ISSN 2721-7736

